

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Indriyanto Seno, 2006, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta.

-----, 2009, Korupsi dan Penegakkan Hukum, Diadit Media, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada.

Arief, Barda Nawawi, 2014, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenanda Media, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2010, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Kencana, Jakarta.

D. Soedjono, 1990, Hukum Narkotika Indonesia, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Faisal, Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Yayasan A3, Malang.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kaligis, OC dan Associates, 2007, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan, Cet. 2 Alumni, Bandung.

- Lubis, Solly, 1989, Seba-serbi Politik dan Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Ganarsih, Yenti, 2003, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering),
Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Perkembangannya, Softmedia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2012, Pembahasan dan Permasalahan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O. S., 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta
-----, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta.
- Husein, Yunus, 2007, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Book Terrace &
Library, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya
Bakti, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenadamedia,
Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 1998, Politik Hukum Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia,
Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta
-----, 2009, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta.

- Nugroho, Setio Sapto, Harmonisasi Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan, Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung.
- Radhie, Teuku Mohammad, 1980, Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta
- Remmelink, Jan, 2003, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sjahdeini, Suttan Remi, 2007, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- , dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- , 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Alumni, Bandung.

- , 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. Supramono, Gatot, 2002, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perbankan suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Theodore, S. Greenberg Dkk, Op. Cit. *Stolen Asset Recovery Good Practice Guide untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non Conciction Based/NCB Asset Forfeiture)*, The World Bank, Washington.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Wargakusumah, Moh. Hasan, 1997, *Perumusan Harmonisasi tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

B. Karya Ilmiah dan Jurnal

- Adji, Indriyanto Seno, 2014, “Administrative Penal Law: kearah Konstruksi Pidana Limitatif”, Makalah, Pelatihan Hukum Pidana & Kriminologi dengan Topik “Asas Asas Hukum Pidana & Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini” Mahasiswa Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta.
- Alexander, Harry, 2006, “Tindak Pidana Kehutanan terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis, Program Konsentrasi Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Azzahra, Afra, 2012, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, “Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset”, Naskah Akademik, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Bawaeda, Adi Freddy, 2014, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam TPPU”, Tesis, Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dewi, Ursula, 2005, “Perbedaan dalam Pengenaan Sanksi Pidana (Disparitas Pidana), terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah DKI Jakarta, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Direktorat Pemeriksaan dan Riset Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2015, “Tipologi terkait Kasus-Kasus yang sudah menjadi Putusan TPPU Periode Januari-Desember 2014” Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I Tahun 2015, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta.

Ganarsih, Yenti, 2004, “Kosep Kriminalisasi terhadap Pencucian Uang”, Makalah, Lokakarya Terbatas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Center for Legal Studies dan Pusdiklat Mahakamah Agung RI, Jakarta.

Gunarto, Marcus Priyo, 2008, “Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, 2014, “Politik Hukum Pidana”, Bahan Kuliah, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hariyono, Bambang, “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Harkrisnowo, Harkristuti, 2004, “Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Amandemennya”, Makalah, Video Confrence Nasional mengenai Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Kenali Nasabah Anda dan Pelaporan Transaksi Keuangan, PPATK, BI, UI, UGM, USU, UNDIP, UNAIR, ELIPS, Jakarta.

Hiariej, Eddy O. S., 2012, “Pembuktian Tebalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

-----, “Pengembalian Aset Kejahatan”, Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional Opinio Juris, Volume 13, Mei-Agustus, 2013.

-----, 2009, “Penyadapan dalam Hukum Pidana”, Artikel, KOMPAS, 15 Juli 2009.

Husein Yunus, “Perampasan Aset Tindak Pidana di Indonesia-Asset Forfeiture of Crime in Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 7, No. 4-Desember 2010

-----, 2001, “Telaah Masuknya Indonesia dalam List Non Cooperative and Territories oleh FATF on Money Laundering” Makalah, Seminar Money Laundering (Pencucian Uang) ditinjau dari perspektif Hukum dan Ekonomi, Jakarta.

Ibrahim, Lina M., 2005, Upaya Penegakan Hukum atas TPPU sebagai Hasil Tindak Pidana Insider Trading di Pasar Modal, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Imron, Mohamad Ali, 2012, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Perbankan”, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta .

Irdyanti, Rika, 2013, “Harmonisasi Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Tesis”, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Hikmahanto Juwana, 2005, “Beberapa Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah, Prosiding Ragkaian Lokakarya Terbatas Masalah

Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Khairoza, Onneri, 2012, “Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang Meninggal dunia berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 1955, “Perbuatan dan Penanggungan Jawab dalam Hukum Pidana”, Pidato, Upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, Stihinggil Yogyakarta.

Pujiastuti, Atin Sri, 2013, “Implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank X”, Tesis, Ilmu Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2010, “Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia, Modul 2, PPATK, Jakarta.

Putra, Muhammad Iftar Arya, 2013, “Permaafan Hakim dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset 2008.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2019.

- Rajagukguk, Erman, 2005, “Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”, Makalah, Lokakarya Anti Money Laundering, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Robinson, “Mewaspadaai Pencucian Uang Melalui Pasar Modal”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Maret, 2003.
- Reksodiputro, Mardjono, 2014, “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia (Penyempurnaan dari Makalah tahun 1993)”, Makalah, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- S. Andrijani, 2007, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kehutanan di Indonesia”, Tesis, Hukum dan Sisten Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Shristian, Nando Nicolas, 2013, “Penerapan Asas Pengaturan Sistematis mengenai Kekhususan (Lex Systematische Specialiteit) Undang-Undang Kehutanan terhadap Undang-Undang Pemmerantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Penanganan Kasus Kejahatan di bidang Kehutanan”, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suhariyono, 2009, “Pembaruan Pidana Denda di Indonesia”, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta

Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 3, Oktober, 2015.

Wicaksono, Hendro, 2013, “Putusan Hakim di Luar Dakwaan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Wicaksono, Tendik, 2011, “Penjatuhan Pidana oleh Hakim di Bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan Undang-Undang dalam perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus: Putusan No. 2597/Pid.B/2009/PN.TNG, Putusan No. 297/Pid.B/2010/PN.TNG pada Pengadilan Negeri Tangerang)”, Tesis, Program Pascasarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 61/PID/2014/PT.DKI

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
2236/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 438/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Bali Regie Ordonantie Stbl 1872 No. 76.

Morphine Regie Ordonantie Stbl 1911 No. 373, Stbl 1911 No. 484 dan No. 485.

Ookust Regie Ordonantie Stbl 1911 No. 494 dan 644, Stbl 1912 No. 255.

Westkust Regie Ordonantie Stbl 1914 No.562, Stbl 1915 No. 245.

Bepalingen Opium Premien Stbl 1916 No. 630.

Verdoovende Middelen Ordonantie Stbl. 1927 jo. 278 jo. No. 536.

Reglemen voor het Beheer der bossen van den lande op Java en Madura 1927.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997
tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In
Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan
Psikotropika, 1988) Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3673).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang
TPPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan TPPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5164).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

E. Website

<http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/91/buletin-statistik-apuppt-vol-112---juni-2019.html> pada tanggal 18 September 2019 pukul 19.00 WIB, halaman 45.

<https://reformasikuhp.org/catatan-terhadap-beberapa-ketentuan-dalam-rancangan-kuhp-2015/> pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 22.00 WIB, halaman 45.

<https://yunipriskilaginting.wordpress.com/2017/06/14/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-uu-tppu-dan-pasal-137-uu-narkotika/> pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 21.00 WIB

<http://elearning.ppatk.go.id>. pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 21.00 WIB.

<http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/77/tipologi-pencucian-uang-berdasarkan-putusan-pengadilan-tahun-2017.html> pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB